



**SUMBER BERITA**

<b>x</b>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Pencairan Dana Banpol Tunggu Hasil Audit BPK**

**KOTA BINTUHAN** - Hingga bulan Mei tahun 2019, Kesbangpol Kabupaten Kaur belum juga melakukan pencairan dana bantuan parpol (banpol). Belum dibayarnya dana banpol tahun ini karena masih terganjal oleh SK yang sampai saat ini belum diterbitkan oleh bagian hukum Pemkab Kaur. Selain itu, Kesbangpol Kaur juga masih menunggu hasil audit dari BPK yang belum keluar saat ini.

"Kita masih menunggu SK dan hasil audit dahulu, kalau memang sudah nanti baru kita sampaikan ke parpol untuk melakukan pencairan. Untuk tahun ini parpol penerima hanya batas bulan Oktober. Nanti dari beberapa bulan terakhir sudah parpol baru dengan perolehan suara yang berbeda," kata Kasi Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Reflen Suryani, SE kepada **RB**.

Sementara berdasarkan Peraturan Bupati Kaur, bantuan dana ke partai politik (parpol) di Kabupaten Kaur sebesar Rp 10.849 per satu suara. Setiap parpol yang berhasil mendudukkan wakil di DPRD Kaur, berhak atas dana bantuan parpol tersebut. Di Kaur hanya 10 parpol

yang mendapatkan dana bantuan setiap tahunnya berdasarkan hasil pileg 2014.

Berdasarkan perolehan suara pileg 2014, parpol yang paling besar mendapat dana bantuan adalah PPP sebesar Rp 88,8 juta lebih. Kemudian Nasdem Rp 88 juta, Gerindra Rp 87 juta lebih. Kemudian Demokrat Rp 79 juta lebih, PDIP Rp 77 juta lebih, PKB Rp 76 juta. Golkar Rp 69 juta, PAN Rp 60 juta, PBB Rp 57 juta dan terakhir PKPI mendapat bantuan Rp 44 juta.



**REFLEN SURYANI**

"Untuk hasil pileg 2019, akan diakomodir nanti mungkin setelah perubahan anggaran. Karena untuk tahun 2019 ini jumlah parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kaur mencapai 12 parpol dengan jumlah suara yang berbeda," pungkas Reflen.

Untuk diketahui dana parpol ini khusus untuk bantuan parpol di Kaur untuk pembentukan sekretariat dan sebagainya. Dan bantuan ini tetap harus dipertanggungjawabkan oleh setiap parpol yang menerima. Sementara parpol yang berhak menerima adalah parpol yang mempunyai utusan di DPRD Kaur saja. (**cik**)